

Identifikasi Permukiman Kumuh Pada Tingkat RW dan Arah Penanganan di Kelurahan Tanjungasari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Adit Pratama Setya Nugraha[✉], Rahma Hayati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2019
Disetujui Juli 2019
Dipublikasikan Agustus 2020

Keywords:

Identification, Slums Area,
RW Level, Handling
Directions

Abstrak

Kelurahan Tanjungasari merupakan salah satu kelurahan yang teridentifikasi kumuh yang ada di Kabupaten Rembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh tingkat RW, (2) Faktor penyebab permukiman kumuh di masing-masing RW, dan (3) Arah penanganan untuk RW yang teridentifikasi paling kumuh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanjungasari dengan sampel yang diambil secara *Purposive sampling* sebanyak 96 sampel. Metode pengumpulan data instrumen lapangan, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi, digitasi dan interpretasi citra. Teknik analisis data menggunakan analisis pembobotan yang didasarkan atas Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 yang telah dimodifikasi dan analisis skoring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Seluruh RW yang ada di Kelurahan Tanjungasari teridentifikasi kumuh ringan (2) Faktor penyebab kekumuhan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum tersedia (3) Kekumuhan tertinggi dialami oleh RW 01 arah penanganannya dengan mengadopsi teori Van Horen, yaitu penanganannya dibagi menjadi 5 tataran utama.

Abstract

Tanjungasari Village is one of the villages identified as slums in Rembang Regency. The purpose of this study is to: 1) Identifying the distribution of slums at the RW level; 2) Identifying factors causing slums in each RW; 3) Identifying Handling directions for the most identified slums. This research is a qualitative research. The population in this study is households that live in Tanjungasari Village with samples taken by purposive sampling of 96 samples. Methods for collecting data on field instruments, questionnaires, interviews and documentation studies, digitizing and interpreting images. The data analysis technique uses weighting analysis based on the Minister of PUPR Regulation No.14 / PRT / M / 2018 which has been modified and the scoring analysis. The results of this study indicate that: 1) All RW's in Tanjungasari Urban Village were identified as mild slums. 2) Factors causing slums due to facilities and infrastructure that are not yet available; 3) The highest slum was experienced by RW 01, its handling direction by adopting Van Horen's theory, namely the handling is divided into 5 main orders.

PENDAHULUAN

Kabupaten Rembang merupakan pintu masuk Provinsi Jawa Tengah dari Jawa Timur, serta penghubung antara Provinsi Jawa Timur menuju Provinsi Jawa Barat, menyebabkan kebutuhan akan permukiman semakin meningkat di Kabupaten Rembang. Kebutuhan dan permintaan permukiman yang tinggi tidak didukung oleh ketersediaan lahan, menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendirikan permukiman di daerah non permukiman seperti di pinggir sungai, pinggir rel kereta api, sekitar pantai, tambak dan lain lain.

Permukiman tersebut akhirnya berkembang menjadi permukiman yang tidak layak huni atau biasa disebut dengan permukiman kumuh. Kekumuhan tersebut dapat terjadi akibat ulah dari masyarakat itu sendiri, ini terkait dengan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya kehidupan sehari-hari yang dimaksud seperti membuang sampah di sembarang tempat, buang air limbah KM/WC tidak di tempat seharusnya tetapi di sungai, laut, saluran, kebun hingga di pekarangan rumah tinggal (Ridlo, 2001).

Dalam kajian indikator lintang sektor yang diterbitkan oleh BPS, mengenai potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Indonesia. Tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2016: 173).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rembang, jumlah penduduk Kecamatan Rembang mengalami peningkatan terutama pada Kelurahan Tanjungsari. Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Rembang menunjukkan hal yang fluktuatif. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tanpa diiringi dengan peningkatan berbagai macam aspek baik fisik dan non fisik maka akan meningkatkan kondisi permukiman menjadi semakin kumuh (Badan Pusat Statistik, 2016: 176).

Berdasarkan SK Kabupaten Rembang No.050/0960/2014, basis data kawasan kumuh tahun 2018, Kelurahan Tanjungsari menempati peringkat pertama daerah kawasan kumuh dengan luas 17,929 hektar. Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2010 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Melihat perkembangan perumahan dan permukiman di Kelurahan Tanjungsari yang semakin pesat, perlu adanya identifikasi kawasan-kawasan RW mana saja yang menjadi daerah kawasan kumuh. Sangat menarik bila dilakukan kajian bagaimana kondisi permukiman kumuh dan bagaimana strategi penanganannya. Sehingga peneliti mengangkat judul "Identifikasi Permukiman Kumuh pada Tingkat RW dan Arah Penanganan di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang".

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana sebaran permukiman kumuh di tingkat RW di Kelurahan Tanjungsari?; (2) Apasaja faktor yang menyebabkan permukiman kumuh pada masing masing RW di Kelurahan Tanjungsari?; (3) Bagaimana arahan arahan penanganan untuk RW yang teridentifikasi paling kumuh?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh tingkat RW di Kelurahan Tanjungsari; (2) Faktor penyebab permukiman kumuh di masing-masing RW di Kelurahan Tanjungsari, dan (3) Mengetahui arahan penanganan untuk RW yang teridentifikasi paling kumuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanjungsari dengan sampel yang diambil secara Purposive sampling sebanyak 96 KK. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen lapangan, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi, digitasi dan interpretasi

citra. Teknik analisis data menggunakan analisis pembobotan yang didasarkan atas permen PUPR No.14/PRT/M/2018 yang telah dimodifikasi dan analisis skoring.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kelurahan Tanjungsari

Penelitian ini dilakukakan di lakukan di Kelurahan Tanjungsari Kabupaten Rembang yang memiliki wilayah paling luas yaitu 21 Ha. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4 Mdpl dengan tingkat kemiringan lereng 2 derajat.

Secara astronomis, Kelurahan Tanjungsari terletak diantara $6^{\circ}42'02,47''$ - $6^{\circ}42'10,25''$ LS dan garis bujur $111^{\circ}19'47.72$ - $111^{\circ}19'49.97''$ BT. Secara adminstratif Kecamatan Tegal Barat memiliki 4 (empat) Rukun Warga yaitu RW 01, RW 02, RW 03, RW 04.

Gambaran Umum Kekumuhan Kelurahan Tanjungsari

Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman yang ada di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut terutama di wilayah permukiman pantai. Salah satu kelurahan yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang ada di sekitar pantai adalah Kelurahan Tanjungsari.

Kekumuhan terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah. Juga dengan adanya ancaman bahaya akresi dan abrasi, serta kondisi lahan pantai yang kurang memadai untuk dapat dikembangkan menjadi sistem drainase. Pembangunan permukiman yang kurang terencana menyebabkan rendahnya nilai keterauran bangunan. Serta minimnya sarana dan prasarana persampahan.

Kondisi ketersediaan air untuk minum juga sangat terbatas. untuk memenuhi kebutuhan untuk masak mereka dengan menggunakan air yang dibeli menggunakan tangki. Walaupun PDAM telah dapat diakses. Akan tetapi kualitas air yang ada di Kelurahan

Tanjungsari tidak dapat dikonsumsi, hanya dapat digunakan untuk sarana mandi, cuci dan kakus.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian hasil skoring dan nilai skor total yang menunjukkan kekumuhan dari masing-masing RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari. Nilai skor hasil survei lapangan setelah dilakukan perhitungan dan penilaian berdasarkan parameter yang telah dibuat sebelumnya disajikan pada tabel 1.

Faktor yang menjadi penyebab kekumuhan yang terjadi di masing-masing RW Kelurahan Tanjungsari dilihat dari jumlah skor. Skor 3 – 5 menjadi penyebab kekumuhan yang dominan, karena sarana dan prasarana yang tersedia hanya menjangkau kurang dari 50% penduduk.

Pembahasan

1. Kategori Kekumuhan Setiap RW di Kelurahan Tanjungsari

Kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Tanjungsari secara umum dari ke empat RW teridentifikasi kumuh ringan dengan total nilai yang berbeda beda. Kekumuhan yang tertinggi terjadi pada RW 01 dengan nilai skor kekumuhan sejumlah 27 dengan pertimbangan lain 18 yang teridentifikasi rendah, dengan status tanah legal dan penggunaan tanah untuk permukiman sudah sesuai RTRW.

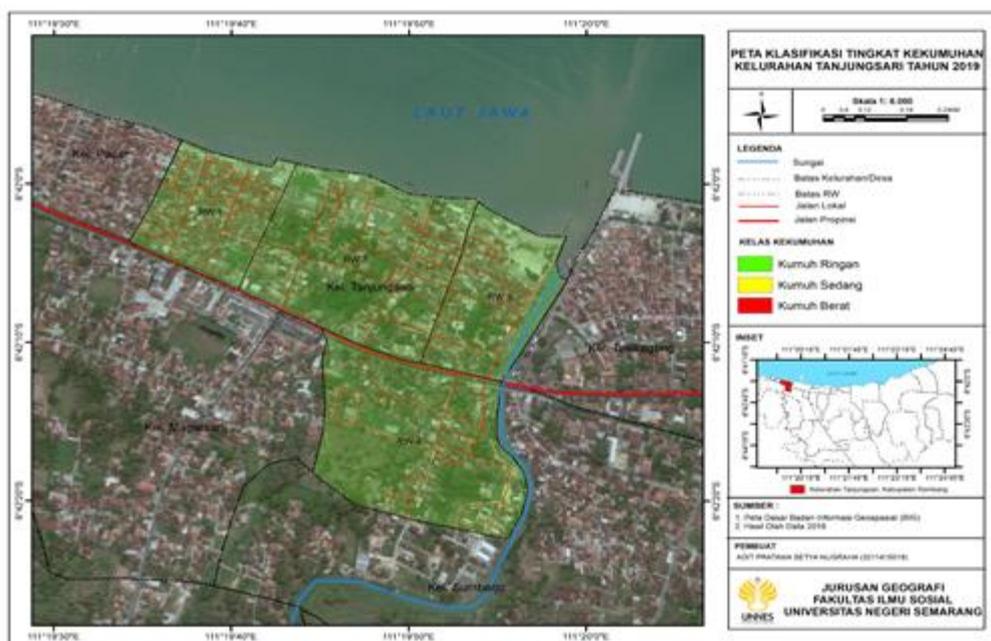
RW 02 dengan total kekumuhan 18, nilai skor pertimbangan lain 16 yang teridentifikasi rendah, legalitas tanah untuk permukiman legal dan penggunaan tanah untuk permukiman sudah sesuai RTRW. Pada RW 03 kondisi dengan nilai 18 sama dengan RW 02. Kondisi pertimbangan lain sama dengan RW 02 dengan kategori rendah.

Berdasarkan klasifikasi kemungkinan perumahan dan permukiman kumuh, seluruh RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari teridentifikasi C5. Kondisi kelas kekumuhan C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal. Berdasarkan skala prioritas penanganan kelas kekumuhan C5 masuk dalam kategori prioritas 9.

Tabel 1. Hasil penilaian kekumuhan

| Kriteria/Indikator | Skor | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | RW 01 | RW 02 | RW 03 | RW 04 |
| Ketidak Teraturan Bangunan | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kepadatan Bangunan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jarak Antar Bangunan | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Persyaratan Teknis Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cakupan Jalan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kualitas Jalan Lingkungan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ketersediaan Drainase Lingkungan | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kualitas Konstruksi Drainase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akses Aman Air Minum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kebutuhan Air Minum Setiap Individu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persyaratan Teknis Pengelolaan Persampahan | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Sistem Pengelolaan Persampahan | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Pasokan Air | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jalan Lingkungan Untuk Mobil Damkar | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 27 | 18 | 18 | 26 |
| Pertimbangan Lain | | | | |
| Kepadatan Penduduk | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Nilai Strategis Lokasi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dukungan Masyarakat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Komitmen Pemerintah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | 18 | 16 | 18 | 16 |
| Legalitas Lahan | | | | |
| Status Tanah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keseuaian RTRW | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Data hasil penelitian,2019



Gambar 1. Peta Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Kelurahan Tanjungsari Tahun 2019

2. Faktor penyebab kekumuhan di RW Kelurahan Tanjungsari

Faktor penyebab kondisi Kekumuhan RW 01

Diketahui faktor dominan yang menyebabkan kekumuhan ada 4 poin. Poin pertama yakni kondisi ketidakteraturan bangunan di mana berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan bahwa mengenai kondisi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian antar bangunan, dan elevasi lantai, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan menunjukkan bahwa tidak memenuhi persyaratan teknis.

Akan tetapi yang lebih menjadi perhatian peneliti adalah keteraturan bangunan yang berkaitan. RW 01 hal ini tidak terlaksanakan karena pada lokasi rata-rata lebar jalan hanya 0,5 – 1 meter, di mana jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 3 saja. Jarak antar bangunan pada lokasi penelitian rata-rata kurang dari satu meter yakni selebar 74,5 cm.

Yang menarik dari RW 01 Kelurahan Tanjungsari adalah Akses air minum pada RW 01 di mana walaupun kuantitas air telah tercukupi akan tetapi dari segi kualitas sangat jauh dari harapan. Penduduk RW 01 sebanyak 40% penduduknya tidak membeli air dari PDAM dikarenakan sebagian warga masih

memanfaatkan air sumur yang mereka punya yang sebagian memang masih berasa tawar dan sisanya membeli di PDAM untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus. Untuk konsumsi masyarakat membeli air dari sumber Gunung Kajar.

Kepadatan penduduk yang ada di RW 01 merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kelurahan Tanjungsari. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kepadatan penduduk perhektar mencapai 182 jiwa/Ha.

Persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan juga masih dapat dikatakan rendah karena tidak ada tempat sampah dengan pemilahan sampah, kemudian tidak ada pula tempat pengolahan sampah (TPS)/TPS 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*). Sistem pengelolaan persampahan pada lingkungan juga masih rendah. Warga hampir 80% warga masih membuang sampah di laut.

Kepadatan perumahan juga sangat tinggi di RW 01 sehingga sampah tidak dapat ditolerir dengan baik oleh lingkungan, oleh sebab itu butuh penanganan yang lebih serius lagi. Kondisi pengelolaan sampah yang kurang baik juga tidak jauh berbeda dengan RW 04. Akan

tetapi kondisi kepadatan bangunan yang masih rendah di RW 04 di mana sampah yang dihasilkan warga masih dapat ditolerir keberadaannya, dengan cara ditimbun atau dibakar di lokasi yang masih terdapat lahan kosong disekitar rumah warga.

Faktor penyebab kondisi Kekumuhan RW 02

Jumlah skor kekumuhan di RW 02 Kelurahan Tanjungsari berdasarkan hasil skoring memiliki jumlah 18 sehingga teridentifikasi kumuh ringan. RW 02 merupakan RW dengan kekumuhan ke 4 di Kelurahan Tanjungsari.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari survei lapangan diketahui beberapa faktor yang dominan menyebabkan kekumuhan yang terjadi di RW 02. Faktor-faktor yang dominan antara lain adalah ketidak teraturan bangunan yang menjadi poin pembahasan adalah kondisi jarak sempadan bangunan yang ada di RW 02 memiliki sempadan dengan ruas jalan hanya 1 meter saja.

Permasalahan lain yang menyebabkan kekumuhan di RW 02 adalah ketersediaan air minum. Permasalahan air minum sama dengan RW 01. Walaupun secara matematis kebutuhan air untuk kebutuhan sehari hari telah tercukupi dengan adanya PDAM dan Sumur gali, namun kualitas air dari kedua sumber tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. penduduk RW 02 hampir 100% membeli air minum dari pedagang keliling sumber Gunung Kajar.

Persyaratan teknis pengelolaan persampahan menjadi permasalahan berikutnya. Berdasarkan hasil survei lapangan. Diketahui fakta bahwa sarana prasarana dan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Di mana tidak tersedia tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik. Tempat pengolahan sampah 3 R (*reduce, reuse, recycle*) tidak tersedia. Serta tidak terdapat TPST (tempat pembuangan sampah sementara). Nilai positif yang ada pada RW 02 adalah semua warga ikut menjadi *member* untuk pembuangan sampah.

a. Faktor Penyebab kondisi kekumuhan RW 03

Jumlah skor dari hasil skoring RW 03 Kelurahan Tanjungsari adalah 18, sehingga dikategorikan kumuh ringan. RW 03 merupakan RW dengan kekumuhan urutan 3 di Kelurahan Tanjungsari.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari survei lapangan diketahui beberapa faktor yang dominan menyebabkan kekumuhan yang terjadi di RW 03. Faktor-faktor yang dominan antara lain adalah ketidakteraturan bangunan di mana permasalahan keteraturan bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. RW 03 yang menjadi titik utama keteraturan bangunan adalah jarak sempadan bangunan yang ada di RW 03 hanya mencapai 0,5 meter dari ruas jalan. Jarak bangunan yang ada di RW 03 sangat dekat di mana berdasarkan hasil survei lapangan memiliki jarak kurang dari 1,05 meter.

Akses air minum yang ada di RW 03 tidak jauh berbeda dengan RW 01 dan RW 02 di mana penduduk RW 03 hampir 100% membeli air minum dari pedagang keliling sumber Gunung Kajar. Kondisi kualitas air yang dihasilkan dari Sumur dan PDAM tidak dapat dikonsumsi. air sumur gali terasa payau, air PDAM keruh dan tidak layak untuk diminum. Kepadatan penduduk di RW 03 merupakan kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah RW 01.

Kondisi pengelolaan persampahan juga menjadi penyebab kekumuhan di RW 03. Tidak tersedia tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik. Tempat pengolahan sampah 3 R (*reduce, reuse, recycle*) tidak tersedia. Nilai positif yang ada pada RW 01 adalah hampir semua warga ikut menjadi anggota untuk pembuangan sampah. Telah terdapat TPST di beberapa tempat walaupun tidak melayani seluruh wilayah RW 03. TPST hanya dibangun di daerah gang yang mana tidak memiliki akses untuk mobil pengangkut sampah masuk ke permukiman.

Terakhir adalah ketersediaan jalan lingkungan untuk akses mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa jalan lingkungan memiliki lebar 3 meter.

b. Faktor Penyebab Kondisi Kekumuhan RW 04

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari survei lapangan diketahui beberapa faktor yang dominan menyebabkan kekumuhan yang terjadi di RW 04 .RW 04 memiliki tingkat kekumuhan tertinggi kedua setelah RW 01. Nilai kekumuhan RW 04 terdiri atas ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, jarak antar bangunan, kualitas jalan lingkungan, kebutuhan air minum setiap individu, persyaratan teknis pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan persampahan, pasokan air, jalan lingkungan untuk mobil pemadam kebakaran.

Jarak sempadan bangunan yang ada di RW 04 memiliki sempadan jalan tidak sampai 6 meter berdasarkan peraturan gubernur Jawa Tengah. Rata-rata jarak rumah dengan as jalan hanya 1 meter.

Ketersediaan air minum penduduk RW 03 hampir 100% membeli air minum dari pedagang keliling sumber gunung kajar. Penyebabnya sama dengan RW lain karena kondisi air sumur dan PDAM yang tidak dapat dikonsumsi.

Jarak antar bangunan menjadi masalah penyebab kekumuhan di RW 04 hal ini terjadi karena, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa rata jarak antar bangunan yang ada di RW 04 adalah 0,8 meter.

Sarana dan Prasarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Di mana tidak tersedia tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik. Dibeberapa lokasi di RW 04 yang masih terdapat ruang terbuka masyarakat memanfaatkannya untuk membakar dan menimbun sampah rumah tangga yang dihasilkan. Nilai positif yang ada pada RW 01 adalah hampir semua warga ikut menjadi anggota untuk pembuangan sampah. Secara umum perbedaan kekumuhan yang terjadi pada Kelurahan Tanjungsari berbeda dengan kasus kekumuhan yang terjadi pada daerah pesisir lain seperti yang terjadi di pesisir utara Kota Semarang yang terjadi karena *densification*

process, ageing process dan inundation process. Kekumuhan yang terjadi akibat sarana dan prasarana yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya. serta kurangnya manajemen penataan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

3. Arahan Penanganan Permukiman Kumuh Pada RW 01 Yang Mengalami Kekumuhan Paling Tinggi

Penanganan permukiman kumuh yang cocok diterapkan di Kelurahan Tanjungsari. mengadopsi dan mengembangkan teori terkemuka dan Van Horen (2000) dalam Priyanto (2016), dapat dilihat bahwa untuk arahan penanganan permukiman dibagi menjadi 5 tataran utama.

Tataran pertama adalah tahap awal yaitu lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui penyediaan infrastruktur dasar. Pembinaan pada RW 01 pada tahap awal ini adalah melakukan terhadap sarana dan prasarana fisik yang ada.

Ketidakteraturan bangunan pada RW 01, penanganannya tidak bisa merubah jarak antara rumah dan ruas jalan ini tidak lepas juga dari jarak rumah yang begitu dekat antar rumah penduduk. Hal ini terjadi karena minimnya ruang yang ada. sehingga berdampak pada minimnya ruang terbuka hijau yang ada di RW 01. Penanganan yang cocok adalah dengan menerapkan *urban farming*, hal ini ditujukan untuk meningkatkan estetika lingkungan dan pendapatan masyarakat, dengan melakukan pola budidaya tanaman yang dapat dikonsumsi seperti sayuran dan buah-buahan, serta tanaman yang memiliki unsur estetika seperti tanaman bunga yang dapat mempercantik tampilan rumah.

Yang menjadi masalah fisik lain adalah terkait persyaratan teknis pengelolaan persampahan di RW 01 sangat dibutuhkan sarana dan prasarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yaitu penyediaan tempat sampah di setiap rumah yang disertai, dengan pemilahan. Kemudian penyediaan tempat pembuangan sampah sementara dan TPS 3R yang belum tersedia. Pengelolaan

sampah yang belum terpenuhi dapat dikelola dengan dibentuknya bank sampah. Di mana selain memberikan edukasi terkait pemilahan sampah dan pengelolaan sampah (daur ulang), disamping itu juga akan memberikan keuntungan kepada warga.

Tataran kedua dikenal dengan tahap penghidupan atau sering dikenal dengan Livehoods, pada tahapan ini menggunakan konsep tridaya atau 3P (*People, profit, planet*) berbasis komunitas berdasarkan nilai nilai daya manusia yang ada pada lokasi setempat. RW 01 diproyeksikan untuk dibentuk komunitas untuk dapat menjadi pioner pengolahan hasil ikan. Hasil akhirnya diharapkan nantinya Kelurahan Tanjungsari menjadi sentra pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Rembang. Apabila berhasil, diharapkan nantinya seiring dengan perkembangan usaha, di dampingi dan didorong untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman kelestarian dan keberlanjutan program-prgram pengentasan kawasan kumuh.

Pada tataran ketiga adalah melakukan penanganan permukiman kumuh dengan cara mengintegrasikan perspektif penataan wilayah kumuh dengan perspektif ruang kota. Puncaknya diharapkan akan menjadi pusat produksi oleh oleh khas Rembang.

Tataran keempat yang dibutuhkan adanya desentralisasi kelembagaan. Yaitu pada RW 01 perlu dibuat oraginsasi khusus yang dibuat oleh warga RW 01 sendiri. pada tataran ini akan dibentuk pokja yang mendukung penanganan permukiman kumuh secara mandiri. Sehingga nantinya tidak selalu menggantungkan diri pada pemerintah dan anggaran negara.

Tataran kelima adalah *politycal will*, diharapkan pemerinath dapat mebantu dan mempermudah Seperti untuk izin tanah dan rumah harus memiliki sertifikat tanah dan IMB, aset komunitas adalah dasar hukum pembentukan, dan terakhir kelembagaan yang dibina dan selalu dipantau oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Artikel ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Tanjungsari dikategorikan kumuh ringan. kekumuhan yang tertinggi terdapat pada RW 01, kekumuhan tertinggi kedua ada di RW 04, kekumuhan tertinggi ke tiga ada di RW 02 dan kekumuhan terendah ada di RW 02. Kondisi pertimbangan lain untuk semua RW dikategorikan rendah, serta legalitas tanah legal dan permukiman sudah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Kabupaten Rembang. (2) Penyebab kekumuhan yang terjadi di Tiap RW adalah dikarenakan minimnya fasilitas sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan lingkungan yang baik (3) Arahan penanganan dibagi menjadi 5 tataran. Tataran pertama adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik yang dibuktikan baik yang belum dibangun, maupun yang dalam kondisi rusak. Tataran kedua dengan melakukan perbaikan terhadap 3 aspek *tripadya* untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penduduk. Tataran ketiga dengan cara mengintegrasikan perspektif penataan wilayah kumuh dengan perspektif kota. Tataran keempat adalah desentralisasi kelembagaan. Terakhir tataran kelima adalah membangun *polytical will*.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2017. SK Kabupaten Rembang No.050/0522/2017. Rembang: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
- BPS Kabupaten Rembang. 2018. Kecamatan Rembang Dalam Angka Tahun 2018. Dapat dilihat di <https://semarangkab.bps.go.id>. Diakses pada 12 Desember 2018 Jam 15.00 WIB.
- Christiawan, Putu Indra dkk. 2016. *Penataan Permukiman Kumuh Masyarakat Pesisir di Kelurahan Sangsit*. Bali: Vol,5 No 2. (hal.52-58)
- Agatha, Elphidia dan Yanto Budisusanto.2017. *Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Teknik ITS Vol.6, No 2.

- Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Menteri No.14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priyanto, Budi. 2016. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rindarjono, Mohammad Gamal. 2012. *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Syam, Muhijar. 2017. Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman di Kelurahan rengas Kecamatan banggae Kabupaten Majene. *Skripsi*. Universitas Alaudin Makassar